

SEKURITISASI LINGKUNGAN OLEH TIONGKOK TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA KE SAMUDRA PASIFIK

Amiza Ega Yulian¹, Fajar Imam Zarkasyi²
Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}
2210631260002@student.unsika.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana Tiongkok membingkai pembuangan air limbah nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan lingkungan melalui perspektif sekuritisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti literatur akademik, dokumen resmi, serta pemberitaan dari media yang kredibel, untuk menelusuri proses pembentukan narasi ancaman, dinamika kontestasi makna, upaya institusionalisasi wacana, dan respons audiens terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan air limbah Fukushima tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis dalam pengelolaan limbah nuklir. Isu ini berkembang menjadi persoalan keamanan setelah dikonstruksikan melalui narasi yang menyoroti potensi risiko terhadap ekosistem laut, kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan. Konstruksi ancaman tersebut diperkuat melalui pernyataan pejabat pemerintah, pemberitaan media milik negara, serta kebijakan pembatasan impor produk perikanan asal Jepang. Berbagai langkah tersebut kemudian mendorong terbentuknya legitimasi politik yang kuat di tingkat domestik Tiongkok. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep keamanan dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ancaman yang bersifat objektif, tetapi juga oleh proses sosial dan politik yang membentuk cara suatu risiko dipahami dan dimaknai sebagai ancaman keamanan.

Kata Kunci: Institusionalisasi, Keamanan Lingkungan, Persepsi Ancaman, Penerimaan Publik, Sekuritisasi.

ABSTRACT

This study examines how China frames the discharge of Fukushima nuclear wastewater into the Pacific Ocean as an environmental security threat, utilizing the perspective of securitization. Employing a qualitative approach and a single-case study design, the research draws on various secondary data sources—such as academic literature, official documents, and credible media reports—to trace the construction of the threat narrative, the dynamics of contested meanings, efforts to institutionalize the discourse, and audience responses to the issue. The findings indicate that the discharge of Fukushima wastewater is no longer viewed merely as a technical matter of nuclear waste management. The issue evolved into a security concern after being constructed

through narratives highlighting potential risks to marine ecosystems, public health, and food security. This construction of a threat was reinforced by statements from government officials, state-owned media coverage, and policies restricting imports of Japanese fishery products. These measures subsequently fostered strong political legitimacy within China. The study's findings demonstrate that the concept of security in international relations is defined not only by the existence of objective threats but also by the social and political processes that shape how risks are understood and interpreted as security threats.

Keywords: *Audience Acceptance, Environmental Security, Institutionalization, Risk Construction, Securitization.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan hidup mengalami pergeseran posisi yang sangat signifikan dalam kajian hubungan internasional. Yang semula dipahami sebagai persoalan ekologis, kini tampil sebagai fenomena politik global dengan konsekuensi lintas negara. Perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, pencemaran industri, serta pengelolaan limbah berbahaya menunjukkan bahwa dampak aktivitas manusia tidak berhenti pada batas teritorial negara (Sasmi, 2025). Dengan demikian, lingkungan tidak lagi sekadar menjadi urusan domestik, melainkan telah masuk ke dalam ruang politik internasional yang sarat kepentingan, persepsi risiko, dan legitimasi kebijakan.

Perubahan tersebut tampak semakin nyata di kawasan maritim yang pada dasarnya saling terhubung tanpa mengenal batas negara yang tegas. Laut tidak hanya berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi jalur utama perdagangan internasional, sumber pemenuhan kebutuhan pangan, serta ruang strategis yang menopang aktivitas ekonomi global. Oleh karena itu, ketika terjadi gangguan terhadap

lingkungan laut, dampaknya sering kali tidak berhenti pada wilayah tertentu, melainkan dapat menjalar ke negara lain dan memunculkan berbagai implikasi politik maupun diplomatik. Kondisi ini menjadi semakin sensitif apabila gangguan tersebut berkaitan dengan teknologi berisiko tinggi, seperti pengelolaan limbah nuklir dan material radioaktif (Somawinata, 2025). Dalam konteks demikian, isu lingkungan tidak lagi dipandang sebatas persoalan pencemaran, melainkan dapat berkembang menjadi kekhawatiran yang menyentuh aspek keamanan manusia serta stabilitas kawasan secara lebih luas.

Di kawasan Asia Timur, kondisi tersebut berkembang dalam konteks yang lebih kompleks. Tingginya intensitas interaksi antarnegara, ketergantungan yang besar terhadap ruang maritim, serta keberadaan sejumlah kekuatan besar dengan kepentingan strategis yang saling bersinggungan menjadikan kawasan ini sangat sensitif terhadap berbagai isu lintas batas. Dalam situasi seperti ini, persoalan lingkungan kerap melampaui dimensi ekologis dan memasuki ranah politik, terutama ketika berkaitan dengan pengelolaan sumber daya bersama maupun keamanan jalur

perdagangan laut (Srivastava, 2023). Hubungan antara Jepang dan Tiongkok, serta posisi penting Samudra Pasifik dalam aktivitas ekonomi dan geopolitik regional, menunjukkan bahwa cara suatu isu pencemaran atau limbah dipersepsikan tidak hanya ditentukan oleh temuan ilmiah semata. Sebaliknya, persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kepentingan strategis, dan kebutuhan masing-masing negara untuk membangun legitimasi di tingkat domestik (Yuan & Lee, 2023).

Dari perkembangan tersebut lahir pendekatan keamanan lingkungan dalam kerangka keamanan non-tradisional. Perspektif ini memandang persoalan ekologis, termasuk pencemaran lintas batas, sebagai bagian dari ancaman kontemporer yang mempengaruhi stabilitas negara, keselamatan manusia, dan ketahanan kawasan. Lingkungan, dalam kerangka ini, tidak lagi ditempatkan sebagai isu teknis atau sekadar agenda pembangunan, melainkan sebagai persoalan strategis yang dapat memperoleh makna keamanan melalui proses pembingkaihan politik, terutama ketika menyangkut risiko jangka panjang dan ketidakpastian dampak (Shakira, 2025).

Keterkaitan antara lingkungan dan keamanan menjadi semakin nyata ketika isu tersebut bersinggungan dengan teknologi nuklir. Meski memiliki manfaat besar, teknologi ini menyisakan risiko ekologis jangka panjang, sehingga pengelolaan limbah nuklir kerap memicu perdebatan yang melampaui ranah ilmiah. Dalam banyak kasus, kebijakan semacam ini dipersepsikan sebagai potensi ancaman terhadap ekosistem laut, kesehatan

manusia, dan keberlanjutan sumber daya maritim (Aditya et al., 2023). Ketika isu ini berkembang ke tingkat internasional, pembahasannya tidak lagi sekadar menyangkut persoalan teknis, tetapi juga mencakup pertanyaan mengenai legitimasi, transparansi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Proses ini memperlihatkan bahwa sekuritisasi dapat terjadi ketika ketidakpastian ilmiah dan kemungkinan dampak jangka panjang dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keamanan lingkungan (Ebenhaezer et al., 2024). Dalam kasus limbah Fukushima, Tiongkok tidak berhenti pada respons diplomatik, tetapi turut membangun narasi ancaman yang diarahkan pada audiens domestik melalui komunikasi politik dan pembentukan persepsi risiko (Nufus et al., 2023).

Inti persoalannya terletak pada pertentangan antara klaim keamanan teknis Jepang dan konstruksi ancaman yang berkembang di tingkat internasional. Jepang menegaskan bahwa pembuangan limbah nuklir Fukushima dilakukan sesuai standar ilmiah yang aman, sedangkan Tiongkok menilainya sebagai risiko ekologis jangka panjang yang sulit diverifikasi secara independen, terutama bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan ekosistem laut (Sun et al., 2026). Dengan demikian, isu ini tidak lagi berdiri sebagai masalah teknis yang netral, melainkan dibentuk oleh persepsi risiko, kepentingan politik, dan tingkat kepercayaan antarnegara. Dalam kerangka ini, Tiongkok mengartikulasikan Fukushima sebagai ancaman yang relevan bagi kepentingan domestik melalui

pembentukan narasi dan penegasan risiko di ruang publik.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan jarak antara norma ideal tata kelola lingkungan global dan kenyataan empiris di lapangan. Secara normatif, pengelolaan limbah nuklir lintas batas semestinya berjalan melalui transparansi, verifikasi ilmiah, akuntabilitas, serta kerja sama internasional yang mengutamakan keselamatan ekologis dan kepentingan publik (Aksan et al., 2024). Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum cukup kuat untuk membangun legitimasi dan kepercayaan antarnegara. Ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang, ditambah kepentingan strategis masing-masing pihak, menjadikan isu limbah Fukushima sebagai arena kontestasi politik dan pertarungan narasi (Sun et al., 2026). Dalam situasi seperti ini, pernyataan Jepang mengenai keamanan teknis pembuangan limbah tidak serta-merta diterima sebagai fakta yang tidak dapat diperdebatkan. Sebaliknya, klaim tersebut terus menjadi objek perdebatan dan penafsiran yang berbeda, terutama dalam konteks politik domestik Tiongkok.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa persoalan lingkungan lintas batas tidak hanya menyangkut konsekuensi ekologis, tetapi juga bagaimana sebuah risiko dimaknai dan diproduksi menjadi ancaman dalam politik internasional. Isu limbah Fukushima penting dikaji karena menunjukkan bahwa perdebatan mengenai keamanan lingkungan tidak ditentukan oleh argumen ilmiah semata, melainkan juga oleh narasi, persepsi ancaman, dan kepentingan negara. Karena itu, penelitian ini

relevan untuk menjelaskan bagaimana Tiongkok mengonstruksi pembuangan air limbah nuklir Fukushima sebagai ancaman keamanan lingkungan melalui proses sekuritisasi. Kajian ini sekaligus memperluas pembahasan keamanan non-tradisional, khususnya dalam melihat keterhubungan antara isu lingkungan, politik domestik, dan produksi ancaman dalam hubungan internasional.

Sejalan dengan itu, literatur mengenai keamanan lingkungan, sekuritisasi, dan tata kelola lingkungan internasional menunjukkan bahwa dimensi politik dan keamanan dalam isu lingkungan semakin menguat. Sebagian studi menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi risiko lintas batas, sementara studi lainnya menyoroti bagaimana isu lingkungan mempengaruhi kebijakan negara, diplomasi internasional, dan respons keamanan terhadap ancaman ekologis. Sehingga, perkembangan literatur yang ada semakin menegaskan posisi isu lingkungan sebagai salah satu agenda penting dalam studi hubungan internasional kontemporer.

Penelitian pertama, karya Ilham Dary Athallah (2022) berjudul *“Sekuritisasi Isu Lingkungan Dalam Hambatan Perdagangan Sawit di European Green Deal”* membahas bagaimana Uni Eropa membingkai sawit sebagai ancaman lingkungan untuk melegitimasi kebijakan proteksionis dalam *European Green Deal*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi ancaman lingkungan yang disebabkan oleh sawit diperkuat oleh industri agrikultur, serikat petani, Komisi Eropa, serta dukungan publik dan Parlemen Eropa, sehingga

European Green Deal diposisikan sebagai *extraordinary measures* yang membenarkan hambatan perdagangan, intervensi regulasi, dan peningkatan alokasi anggaran lingkungan.

Penelitian kedua, karya Misbahul Azizah dkk. (2024) berjudul “*Pertanggungjawaban Jepang Terhadap Pembuangan Air Limbah Nuklir; Pelanggaran Hukum Lingkungan Internasional Mengancam Lingkungan Global*” mengkaji tanggung jawab Jepang atas kebijakan pembuangan air limbah nuklir Fukushima dengan menggunakan perspektif hukum lingkungan internasional sebagai kerangka analisis utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dipandang berpotensi mencemari laut dan melanggar kewajiban internasional Jepang, seperti pencegahan dampak lintas batas, transparansi penilaian lingkungan, dan koordinasi internasional, sehingga Jepang dapat dikenai *strict liability* apabila kerugian lingkungan dapat dibuktikan.

Penelitian ketiga, karya Siti Fitri Auliaun Nufus dkk. (2023) berjudul “*Respon Tiongkok Terhadap Ancaman Keamanan Maritim Sebagai Dampak dari Pembuangan Limbah Nuklir Jepang ke Samudera Pasifik*” membahas respons Tiongkok terhadap ancaman keamanan maritim akibat pembuangan limbah Fukushima. Penelitian ini menemukan bahwa limbah tersebut dipersepsikan mengancam keselamatan laut, ekonomi maritim, dan ketahanan sosial masyarakat Tiongkok, sehingga memunculkan berbagai respons berupa embargo impor, tekanan diplomatik, pemantauan ketat, kampanye media, hingga aksi masyarakat sebagai upaya

meredam ancaman yang dipersepsikan berasal dari Jepang.

Penelitian keempat, karya Meng Li dan Xuedong Wang (2023) berjudul “*Legal responses to Japan’s Fukushima Nuclear Wastewater Discharge into the sea from the perspective of China’s right-safeguarding strategies*” berfokus pada strategi hukum Tiongkok terhadap pembuangan limbah Fukushima oleh Jepang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tindakan Jepang berpotensi menimbulkan persoalan dalam kerangka UNCLOS karena dinilai belum memenuhi sejumlah kewajiban penting, seperti pelaksanaan penilaian dampak lingkungan, pemberitahuan kepada negara yang berpotensi terdampak, serta pencegahan pencemaran di lingkungan laut. Sehingga, Tiongkok memiliki argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menempuh langkah perlindungan hak dan kepentingannya melalui instrumen hukum nasional maupun mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

Penelitian kelima, karya Xiao Liang dkk. (2024) berjudul “*The Impact of Japan’s Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in China and Japan*” menganalisis dampak pembuangan limbah Fukushima terhadap produksi perikanan, perdagangan, dan ketahanan pangan di Tiongkok serta Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah nuklir berpotensi menurunkan produksi perikanan global, memperburuk indikator ekonomi kedua negara, serta meningkatkan defisit protein akibat penurunan konsumsi produk perikanan,

sehingga ketahanan pangan turut terancam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat dilihat bahwa kelima penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini. Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar teoritis dan empiris untuk memahami isu pembuangan limbah nuklir Fukushima dalam konteks hubungan internasional. Sebagian penelitian menjelaskan isu ini melalui perspektif sekuritisasi, sementara penelitian lainnya menunjukkan adanya kekhawatiran internasional, respons politik dan diplomatik, serta persepsi ancaman terhadap lingkungan laut, keamanan pangan, dan kepentingan nasional Tiongkok. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa isu limbah Fukushima tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga memiliki dimensi keamanan dan politik yang penting dalam hubungan internasional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu pembuangan limbah nuklir Fukushima, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak lingkungan, implikasi hukum internasional, serta respons politik dan kebijakan negara-negara terkait, terutama Tiongkok. Berbagai penelitian tersebut memberikan pemahaman yang penting mengenai konsekuensi yang muncul setelah kebijakan pembuangan limbah Fukushima dipandang sebagai ancaman terhadap lingkungan, keamanan pangan, dan kepentingan nasional. Namun demikian, masih terdapat ruang yang perlu dieksplorasi lebih lanjut karena sebagian besar literatur cenderung menganggap

ancaman tersebut sebagai sesuatu yang telah terbentuk. Akibatnya, perhatian penelitian lebih banyak tertuju pada dampak dan respons yang muncul, sementara proses bagaimana ancaman itu dikonstruksikan dan memperoleh legitimasi masih belum banyak dibahas secara mendalam.

Akibatnya, masih belum terjelaskan secara memadai bagaimana isu yang pada awalnya merupakan persoalan teknis pengelolaan limbah nuklir dapat berkembang menjadi ancaman keamanan yang memperoleh legitimasi politik dan penerimaan publik di Tiongkok. Padahal, berbagai respons diplomatik, ekonomi, dan politik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan risiko lingkungan itu sendiri, tetapi juga oleh proses sosial dan politik yang membentuk, mendefinisikan, dan melegitimasi risiko tersebut sebagai ancaman. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana pembuangan air limbah nuklir Fukushima dikonstruksi sebagai ancaman keamanan lingkungan dalam konteks politik domestik Tiongkok.

Penelitian ini berupaya menjelaskan cara wacana politik membentuk persepsi ancaman di tingkat domestik Tiongkok, sehingga isu lingkungan dapat bergeser dari persoalan teknis menjadi isu keamanan. Penelitian ini memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana suatu isu lingkungan dapat dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui proses politik dan diskursif. Dalam hal ini, konsep sekuritisasi dari *Copenhagen School* digunakan untuk menganalisis bagaimana Tiongkok membingkai pembuangan air limbah nuklir

Fukushima sebagai ancaman keamanan lingkungan. Pendekatan ini relevan karena memandang keamanan bukan sebagai kondisi yang bersifat objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan politik yang dibentuk melalui narasi, klaim ancaman, dan penerimaan *audiens* (Sharma, 2024).

Dalam perspektif *Copenhagen School* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, keamanan dipahami sebagai hasil konstruksi sosial dan politik. Suatu isu menjadi isu keamanan bukan semata karena sifat ancamannya, tetapi karena ada aktor yang membingkainya sebagai ancaman melalui *speech act* (Buzan et al., 1998). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi juga mencakup dimensi non-militer seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Bhramanta, 2023). Dengan begitu, isu kontemporer dapat dipersepsikan sebagai ancaman apabila dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara maupun masyarakat.

Secara konseptual, sekuritisasi merupakan proses yang membawa sebuah isu keluar dari ranah politik normal dan membingkainya sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan penanganan khusus (Shakira, 2025). Buzan et al. (1998) mendefinisikan sekuritisasi sebagai “*The move that takes an issue beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politic or as above politics*”. Artinya, suatu isu menjadi objek sekuritisasi ketika berhasil dikonstruksikan sebagai ancaman yang tidak lagi cukup ditangani melalui mekanisme kebijakan biasa, melainkan menuntut respons yang bersifat khusus dan mendesak.

Proses sekuritisasi umumnya berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu *non-politicized*, *politicized*, dan *securitized*. Tahap *non-politicized* menunjukkan bahwa suatu isu belum menjadi perhatian politik, sedangkan tahap *politicized* menandakan bahwa isu tersebut telah masuk ke agenda publik dan diproses melalui mekanisme politik normal. Sementara itu, tahap *securitized* terjadi ketika suatu isu dipahami sebagai ancaman keamanan yang mendesak sehingga memerlukan tindakan khusus di luar prosedur biasa. Dalam tahap ini, keberhasilan sekuritisasi sangat bergantung pada penerimaan *audiens* terhadap konstruksi ancaman yang dibangun oleh aktor terkait (Buzan et al., 1998).

Selain tahapan-tahapan tersebut, proses sekuritisasi juga ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *referent object*, *audience acceptance*, dan *extraordinary measures*. Komponen-komponen ini menjelaskan bahwa proses sekuritisasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ancaman, tetapi juga dengan cara ancaman tersebut dibingkai, siapa yang membingkai, siapa yang menjadi sasaran perlindungan, serta bagaimana *audiens* meresponsnya. Karena itu, sekuritisasi lebih tepat dipahami sebagai proses diskursif dan politis yang melibatkan interaksi antara aktor, ancaman, dan penerimaan publik (Buzan et al., 1998).

Untuk menganalisis proses sekuritisasi secara lebih sistematis, penelitian ini merumuskan sejumlah dimensi analisis yang mengacu pada kerangka pemikiran *Copenhagen School*. Dimensi-dimensi tersebut disusun berdasarkan elemen-elemen utama dalam proses sekuritisasi dan digunakan sebagai panduan untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan. Adapun dimensi analisis yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi untuk menganalisis bagaimana Tiongkok mengonstruksi pembuangan air limbah nuklir Fukushima sebagai isu keamanan lingkungan, yakni dengan membingkai persoalan yang semula bersifat teknis pengelolaan limbah nuklir menjadi ancaman terhadap lingkungan laut, kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan melalui pernyataan resmi, media pemerintah, serta respons diplomatik.

Dalam proses inilah, pemerintah Tiongkok dipahami sebagai aktor yang membangun, memperkuat, dan menginstitutionalisasi narasi ancaman hingga dapat memperoleh penerimaan dari audiens domestik, sehingga isu limbah Fukushima tidak hanya digambarkan sebagai persoalan lingkungan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memberi legitimasi terhadap berbagai respons politik dan diplomatik Tiongkok dalam relasinya dengan Jepang tentunya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) untuk menganalisis bagaimana Tiongkok mengonstruksi pembuangan air limbah nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik sebagai ancaman keamanan lingkungan dalam kerangka sekuritisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap proses pembentukan makna, narasi, serta konteks politik yang melingkupi isu tersebut. Melalui studi kasus, penelitian ini tentunya memusatkan perhatian hanya pada satu kasus spesifik saja sehingga dapat menghasilkan analisis yang kontekstual dan menyeluruh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur akademik, dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional, laporan lembaga terkait, serta media massa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menelusuri, menyeleksi, serta mengorganisasi sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan kerangka sekuritisasi untuk mengidentifikasi pola konstruksi ancaman yang dilakukan oleh Tiongkok. Melalui proses ini, penelitian bertujuan

menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana isu pembuangan limbah nuklir Fukushima ditingkatkan sebagai ancaman keamanan lingkungan dalam konteks politik internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi Makna dalam Mendefinisikan Fukushima

Pembuangan air limbah nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik tidak hanya memunculkan perdebatan soal keselamatan nuklir, tetapi juga memperlihatkan adanya perebutan makna atas risiko itu sendiri. Sejak awal, isu limbah Fukushima ini bisa dilihat hanya sebagai sebuah persoalan teknis tentang kadar radioaktif atau standar keselamatan. Isu ini juga menjadi ruang politik tempat para aktor berusaha menentukan bagaimana risiko lingkungan harus dimaknai dan dijelaskan kepada publik (Mabon & Kawabe, 2022). Dalam konteks ini, yang diperdebatkan bukan hanya apakah air tersebut telah diproses, tetapi apakah air itu benar-benar aman dan siapa yang berhak menetapkan standar keamanannya.

Pemerintah Jepang membingkai air yang dilepaskan tersebut sebagai *treated water*, yaitu air yang sudah melalui proses pemurnian dengan *Advanced Liquid Processing System* (ALPS) dan dinilai memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Pandangan ini diperkuat oleh IAEA yang menyatakan bahwa pendekatan Jepang sesuai dengan standar keselamatan internasional dan diperkirakan hanya menimbulkan dampak radiologis yang sangat rendah terhadap manusia maupun lingkungan (IAEA, 2025). Dengan begitu, limbah Fukushima

ditempatkan sebagai persoalan teknis yang dapat dikelola melalui sains, regulasi, dan pengawasan internasional, sehingga tetap berada dalam ranah *normal politics*.

Namun, definisi tersebut tidak diterima oleh semua pihak. Pemerintah Tiongkok memilih menggunakan istilah *nuclear-contaminated water* dalam pernyataan resminya dan menolak istilah *treated water*. Perbedaan istilah ini dinilai penting karena mempengaruhi cara publik memahami risiko yang diperdebatkan. Istilah *treated water* menekankan proses pemurnian dan kepatuhan terhadap standar keselamatan, sedangkan *nuclear-contaminated water* mempertahankan asosiasi dengan kecelakaan nuklir Fukushima dan potensi bahaya radioaktif yang menyertainya (Sun et al., 2026). Karena itu, perdebatan istilah bukan hanya sekadar soal bahasa saja, tetapi juga soal siapa yang berhak untuk menentukan makna risiko.

Perbedaan pandangan antara Jepang dan Tiongkok menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak selalu menghasilkan kesimpulan politik yang sama. Walaupun banyak kajian menyebut dampak radiologis dari pembuangan air limbah Fukushima masih berada dalam batas yang diperbolehkan, namun tidak ada aktor yang bisa memberikan jaminan mutlak atas seluruh dampak jangka panjangnya. Ruang ketidakpastian inilah yang membuka peluang bagi munculnya interpretasi yang berbeda terhadap risiko yang sama (Azizah et al., 2024). Jepang menekankan bukti ilmiah yang mendukung keamanan pelepasan air tersebut, sedangkan Tiongkok menyoroti keterbatasan

pengetahuan mengenai dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya bisa dipastikan (Christiastuti, 2023).

Dalam konteks ini, sains tidak bekerja sebagai sumber kebenaran tunggal yang secara otomatis diterima oleh semua pihak. Sebaliknya data dan pengetahuan ilmiah justru menjadi sebuah objek tafsir yang diperebutkan untuk menguatkan posisi politik oleh masing-masing aktor (Verma & Snyder, 2025). Karena itulah, inti perdebatan terkait limbah Fukushima tidak hanya berkaitan dengan kandungan radionuklida atau standar keselamatan teknis saja, tetapi juga dengan siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas. Jepang berupaya memperoleh legitimasi melalui otoritas ilmiah dan dukungan IAEA, sedangkan Tiongkok mempertanyakan kecukupan klaim tersebut dengan menyoroti risiko yang belum sepenuhnya dapat dipastikan (Sun et al., 2026). Dengan demikian, kontestasi makna dalam kasus limbah Fukushima juga merupakan kontestasi atas legitimasi pengetahuan dan otoritas dalam mendefinisikan sebuah keamanan.

Tiongkok kemudian memanfaatkan ruang ketidakpastian tersebut untuk menggeser perdebatan dari persoalan teknis menjadi persoalan keamanan lingkungan dan perlindungan publik (Muliawan et al., 2024). Ketika keamanan tidak lagi dipahami hanya lewat parameter ilmiah, tetapi juga lewat kemungkinan risiko yang belum bisa disingkirkan, maka isu limbah Fukushima dapat diposisikan sebagai isu yang melampaui ranah kebijakan biasa (Debin, 2023). Dalam hal ini ketidakpastian bukan hanya tentang

persoalan ilmiah saja tetapi juga sumber daya politik untuk membangun sebuah definisi risiko dan keamanan.

Oleh karena itulah, kontestasi makna dalam kasus limbah Fukushima menunjukkan bahwa keamanan lingkungan tidak ditentukan oleh keberadaan risiko objektif, melainkan juga oleh kemampuan aktor membentuk interpretasi atas risiko tersebut (Polleri, 2025). Sebelum suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman keamanan, harus ada perebutan definisi tentang apa yang dianggap aman, berbahaya, dan layak mendapat perhatian politik (Rasmussen, 2023). Dari titik inilah proses sekuritisasi bergerak ke tahap berikutnya, yaitu ketika salah satu interpretasi atas isu limbah Fukushima mulai dikonstruksi secara sistematis sebagai ancaman terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keamanan pangan.

Konstruksi Fukushima Sebagai Ancaman Keamanan Lingkungan

Kontestasi makna atas Fukushima tidak otomatis menghasilkan sekuritisasi. Perbedaan interpretasi hanya membuka ruang bagi aktor untuk mendefinisikan risiko secara berbeda. Sekuritisasi mulai terjadi ketika salah satu interpretasi itu tidak lagi berhenti sebagai pandangan alternatif, tetapi dikonstruksi sebagai ancaman yang menuntut perhatian politik lebih besar (Sun et al., 2026). Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok bertindak sebagai *securitizing actor* yang menggeser isu limbah Fukushima dari persoalan teknis pengelolaan limbah nuklir menjadi persoalan lingkungan, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Wang, 2024). Pergeseran ini tentunya penting karena

menunjukkan bahwa ancaman tidak muncul secara otomatis dari limbah nuklir itu sendiri, melainkan dibentuk melalui proses politik yang menghubungkan risiko dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Transformasi tersebut berlangsung melalui berbagai *speech act* yang disampaikan secara konsisten oleh pemerintah Tiongkok melalui pernyataan resmi, konferensi pers, dan saluran diplomatik. Salah satu yang paling menonjol adalah pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yaitu Wang Wenbin yang menyebut bahwa keputusan Jepang sebagai tindakan yang “sangat egois dan tidak bertanggung jawab” karena menempatkan kepentingannya sendiri di atas “kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia” (MFA, 2023). Hal penting dari pernyataan tersebut bukan hanya isi kritiknya, tetapi juga upaya untuk mendefinisikan ulang makna kebijakan limbah Fukushima itu sendiri. Jika Jepang dan IAEA berusaha mempertahankan isu limbah Fukushima sebagai persoalan teknis, maka Tiongkok justru membingkainya sebagai persoalan yang memiliki konsekuensi politik, moral, dan keamanan yang lebih luas (Sun et al., 2026).

Pilihan istilah seperti “egois” dan “tidak bertanggung jawab” menunjukkan bahwa ancaman tidak dibangun hanya melalui penjelasan teknis tentang bahaya lingkungan saja. Jika Tiongkok hanya ingin menyoroti risiko lingkungan cukup dengan istilah seperti “berisiko” atau “berbahaya” saja. Namun penggunaan istilah yang bermuatan moral menunjukkan adanya upaya untuk menggeser perdebatan dari keselamatan teknis ke persoalan etika

dan tanggung jawab politik (Sun et al., 2026). Jepang akhirnya tidak lagi direpresentasikan sekadar sebagai negara yang mengambil keputusan kontroversial dalam pengelolaan limbah nuklir, tetapi sebagai aktor yang dianggap mengabaikan tanggung jawab terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Proses moralisasi ancaman tersebut kemudian diperluas dengan menghubungkan sebuah isu limbah Fukushima pada kepentingan yang melampaui batas nasional. Pernyataan mengenai “kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia” tentunya menunjukkan bahwa ancaman tidak lagi diposisikan pada level bilateral semata saja. Risiko yang awalnya terkait kebijakan domestik Jepang digambarkan sebagai persoalan yang bisa mempengaruhi lingkungan laut global, keamanan pangan internasional, dan keselamatan generasi mendatang (He & Zhao, 2024). Dengan cara inilah, ancaman berubah dari isu nasional menjadi isu yang memiliki dimensi global. Strategi tersebut tentunya membuat isu limbah Fukushima lebih mudah diposisikan sebagai isu keamanan lingkungan (Anisa & Atman, 2025).

Perluasan makna ancaman ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan *existential threat* dalam narasi sekuritisasi Tiongkok. Ancaman limbah Fukushima tidak dibangun melalui bukti bahwa kerusakan sudah terjadi, tetapi melalui penekanan pada kemungkinan dampak serius di masa depan (Sun et al., 2026). Potensi pencemaran laut, masuknya zat radioaktif ke dalam rantai makanan, serta risiko terhadap kesehatan generasi sekarang dan mendatang dikonstruksi

sebagai *existential threat* yang mengancam lingkungan laut, kesehatan manusia, dan keamanan pangan sebagai *referent object* yang harus dilindungi (Qi & Gao, 2025). Dengan begitu, ancaman dibangun secara antisipatif yakni dengan menjadikan kemungkinan bahaya di masa depan sebagai alasan untuk bertindak pada masa sekarang.

Keberhasilan konstruksi *existential threat* ini juga dipengaruhi oleh karakter isu nuklir yang memang memiliki muatan simbolik kuat. Isu nuklir sering dikaitkan dengan bahaya yang tidak terlihat, sulit dideteksi langsung, dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Dalam konteksnya di Asia Timur, sensitivitas terhadap isu nuklir juga diperkuat oleh memori historis mengenai radiasi dan keselamatan nuklir (BRIN, 2024). Oleh sebab itulah, ketika Tiongkok mengaitkan isu limbah Fukushima dengan kemungkinan pencemaran radioaktif, ancaman tersebut menjadi lebih mudah menarik perhatian publik dibandingkan jika risiko yang sama dikaitkan dengan isu lingkungan yang kurang sensitif secara politik dan sosial.

Namun, efektivitas konstruksi ancaman tidak hanya bergantung pada simbolisme isu nuklir saja, ancaman juga harus dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena hal tersebutlah, pemerintah Tiongkok secara konsisten menghubungkan isu limbah Fukushima dengan keamanan pangan, kesehatan manusia, dan kualitas lingkungan hidup sebagai *referent object* yang diklaim sedang terancam (Muliawan et al., 2024). Risiko yang semula abstrak kemudian diartikan menjadi persoalan yang

berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, keselamatan keluarga, dan kesejahteraan generasi mendatang. Strategi ini tentunya membuat ancaman menjadi lebih konkret dan lebih mudah dipahami publik (Hayashida & Horiguchi, 2024).

Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok memanfaatkan ketidakpastian ilmiah yang masih mengelilingi pembuangan limbah Fukushima. Meskipun Jepang dan IAEA menegaskan bahwa pelepasan air tersebut memenuhi standar keselamatan internasional, Tiongkok tetap berargumen bahwa keamanan jangka panjang dari kebijakan itu belum dapat dipastikan sepenuhnya (IAEA, 2025). Dalam konteks ini, ketidakpastian menjadi sumber legitimasi bagi konstruksi ancaman. Semakin besar ruang ketidakpastian yang ditunjukkan, semakin kuat alasan untuk menuntut kehati-hatian dan tindakan pencegahan (Chen, 2023). Karena itu, sekritisasi limbah Fukushima tidak dibangun dengan menolak sains sepenuhnya, melainkan dengan menyoroti keterbatasan sains dalam memberi kepastian absolut atas dampak masa depan.

Dengan begitu, konstruksi isu limbah Fukushima sebagai ancaman keamanan lingkungan menunjukkan bahwa sebuah ancaman tidak muncul secara otomatis dari keberadaan limbah nuklir itu sendiri. Ancaman menjadi bermakna karena dibangun melalui interaksi antara *securitizing actor*, *speech act* yang memperebutkan otoritas atas realitas Fukushima, proses moralitas ancaman, perluasan ancaman ke tingkat global, konstruksi *existential threat* terhadap lingkungan laut, kesehatan manusia, dan keamanan

pangan, dan pemanfaatan ketidakpastian ilmiah yang masih menyertainya. Melalui proses ini tentunya isu limbah Fukushima bergerak dari ranah politik normal menuju isu keamanan yang memerlukan respons berbeda dari persoalan lingkungan biasa.

Institusionalisasi Narasi Ancaman oleh Negara Tiongkok

Keberhasilan sekuritisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan aktor politik mengonstruksi ancaman, tetapi juga pada kemampuannya mempertahankan ancaman agar tetap relevan dalam ruang publik. Ancaman tidak akan memiliki pengaruh politik yang kuat jika hanya disampaikan sekali oleh satu pejabat. Sebaliknya, ancaman menjadi bertahan ketika terus direproduksi oleh berbagai institusi yang memiliki otoritas dan legitimasi (Sun et al., 2026). Karena itu, setelah isu limbah Fukushima dikonstruksi sebagai ancaman terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keamanan pangan, proses sekuritisasi berlanjut ke tahap institusionalisasi, yaitu ketika narasi ancaman dilembagakan ke dalam berbagai struktur negara. Dengan cara ini institusionalisasi mengubah klaim politik menjadi pengetahuan yang dianggap sah dalam ruang publik.

Dalam proses ini, peran *securitizing actor* juga meluas. Jika pada tahap sebelumnya ancaman banyak disampaikan melalui pernyataan pejabat pemerintah, maka pada tahap institusionalisasi negara bertindak sebagai *securitizing actor* kolektif yang melibatkan berbagai lembaga dalam mereproduksi narasi yang sama (Flohr, 2025). Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara konsisten

menegaskan bahwa pembuangan air limbah Fukushima berpotensi mengancam lingkungan laut, kesehatan manusia, dan keamanan pangan. Hal yang penting bukan hanya isi pernyataannya, tetapi juga bagaimana *speech act* itu terus diulang dalam forum diplomatik, konferensi pers, dan komunikasi publik (MFA, 2023). Melalui pengulangan yang teratur inilah ancaman limbah Fukushima tidak lagi tampil sebagai respons yang sesaat, tetapi sebagai persoalan yang dianggap nyata, mendesak, dan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan.

Proses pengulangan ini sangat penting karena ancaman yang hanya disampaikan sekali mudah dianggap sebagai opini politik sementara, sedangkan ancaman yang terus direproduksi oleh berbagai institusi negara cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat (Baele & Thomson, 2025). Dalam kasus limbah Fukushima, pengulangan yang konsisten tentunya membuat narasi sebuah ancaman bergerak dari level pernyataan menuju pemahaman sosial yang tentunya lebih luas. Akibatnya, publik tidak hanya mengetahui penolakan pemerintah terhadap kebijakan Jepang saja, tetapi juga terus dihadapkan pada interpretasi yang menempatkan limbah Fukushima sebagai ancaman terhadap kepentingan publik (Sun et al., 2025). Dengan kata lain, institusionalisasi mengubah ancaman dari sekadar klaim politik menjadi kerangka interpretasi yang terus diperkenalkan kepada masyarakat.

Institusionalisasi narasi ancaman juga diperkuat oleh lembaga administratif negara yang memiliki fungsi regulatif. Ketika *General Administration of Customs* memperketat pengawasan dan kemudian memberlakukan pembatasan terhadap produk perikanan dari Jepang, narasi ancaman ini tidak lagi berada di level diskursif saja, tetapi mulai diartikan ke dalam sebuah praktik birokrasi yang konkret (Davidson, 2025). Pada tahap ini, ancaman yang sebelumnya dikomunikasikan melalui *speech act* mulai memiliki bentuk administratif dalam mekanisme pemerintahan sehari-hari. Kebijakan tersebut dibenarkan dengan alasan perlindungan terhadap lingkungan laut, kesehatan manusia, dan keamanan pangan sebagai *referent object* yang dianggap terancam (Aksan et al., 2024). Karena itu, institusionalisasi tidak hanya menyebarkan sebuah ancaman saja, tetapi juga memasukkannya ke dalam sebuah praktik pemerintahan rutin.

Peran media pemerintah menjadi unsur penting berikutnya. Media resmi seperti *Xinhua*, *China Daily*, dan *Global Times* secara konsisten memberitakan risiko yang dikaitkan dengan pembuangan air limbah nuklir Fukushima, kritik pemerintah Tiongkok terhadap kebijakan Jepang, serta perdebatan tentang dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Xinhua, 2026; Global Times, 2026). Dalam perspektif sekuritisasi, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi saja, tetapi juga sebagai sebuah mekanisme reproduksi yang membantu mempertahankan ancaman dalam ruang publik melalui penyebaran narasi yang

berulang dan konsisten (Samsidar, 2025). Dengan cara ini tentunya ancaman limbah Fukushima terus hadir dalam perhatian publik dan perlahan memperoleh status sebagai isu yang relevan untuk dipantau dan direspon.

Melalui reproduksi yang dilakukan oleh diplomasi negara, birokrasi, dan media pemerintah, cakupan ancaman juga semakin meluas. Jika pada awalnya ancaman lebih banyak dikaitkan dengan kepentingan domestik Tiongkok, maka dalam perkembangannya lingkungan laut global dan masyarakat internasional juga diposisikan sebagai *referent object* yang perlu dilindungi. Dalam konstruksi ini yang dianggap terancam bukan hanya masyarakat Tiongkok saja, tetapi juga pihak-pihak yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut (McCurry & Davidson, 2023). Perluasan *referent object* ini dinilai penting karena memungkinkan pemerintah Tiongkok membingkai posisinya sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan nasional semata.

Dapat dipahami bahwa institusionalisasi membantu menjelaskan mengapa sekuritisasi dalam isu Fukushima mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Tanpa dukungan institusi negara, *speech act* yang membangun ancaman berisiko kehilangan relevansi seiring waktu atau tergeser oleh isu lain yang lebih mendesak (Koppenborg, 2023). Namun ketika ancaman terus direproduksi melalui diplomasi, birokrasi, media, dan perangkat negara lainnya, ancaman tersebut memperoleh keberlanjutan politik yang membuatnya tetap hadir dalam ruang publik (Lederer, 2025). Oleh karena itu,

institusionalisasi tidak hanya menyebarkan sebuah ancaman, tetapi juga mempertahankannya sebagai sebuah realitas yang dianggap relevan dan tentunya layak memperoleh perhatian politik secara terus-menerus.

Audience Acceptance dan Legitimasi Kebijakan terhadap Jepang

Keberhasilan narasi ancaman tidak ditentukan hanya oleh seberapa sering ancaman disampaikan, tetapi oleh sejauh mana ancaman itu diterima sebagai sesuatu yang nyata, relevan, dan layak diperhatikan secara khusus (Karyotis et al., 2025). Maka tahap yang paling menentukan dalam proses sekuritisasi dalam isu limbah Fukushima ini bukan hanya ketika pemerintah Tiongkok mengkonstruksi sebuah ancaman, tetapi ketika konstruksi tersebut dapat memperoleh *audience acceptance* dari audiens domestik. Pada titik ini, ancaman berhenti menjadi klaim politik pemerintah semata dan mulai berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi tindakan negara (Sun et al., 2026).

Audience acceptance tidak bisa dipahami hanya sebagai munculnya sebuah tindakan sosial contohnya seperti *panic buying*, boikot, ataupun demonstrasi, respons semacam itu memang bisa muncul setelah narasi ancaman diproduksi, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa sekuritisasi berhasil. *Audience Acceptance* berada pada level diskursif yakni level ketika publik telah menerima cara negara mengartikan suatu isu sebagai ancaman (Ng, 2023). Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya tindakan masyarakat, tetapi juga apakah ada kesesuaian antara narasi

ancaman pemerintah dan cara masyarakat memahami Fukushima.

Penerimaan tersebut tidak muncul secara spontan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Tiongkok secara konsisten menghubungkan isu limbah Fukushima dengan kesehatan manusia, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan laut (Aksan et al., 2024). Pada saat yang sama, berbagai institusi negara dan media pemerintah terus mereproduksi narasi tersebut dalam ruang publik. Pengulangan ini tentunya membuat sebuah ancaman tidak lagi dapat dipahami sebagai pandangan dari pemerintah semata saja, melainkan [perlahan sudah menjadi sebuah kerangka interpretasi publik untuk memahami isu limbah Fukushima (Hu, 2025). Karena itu, *audience acceptance* merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang berlangsung terus-menerus.

Selain itu, karakteristik risiko nuklir turut memperkuat *audience acceptance*. Berbeda dengan ancaman yang bisa dilihat secara langsung, radiasi sering dipersepsikan sebagai bahaya yang tidak terlihat, sulit dideteksi, dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya dapat dipastikan (BRIN, 2024). Kondisi ini membuat argumen kehati-hatian lebih mudah diterima. Ketika Tiongkok menempatkan isu limbah Fukushima sebagai sebuah ancaman terhadap kesehatan manusia dan keamanan pangan, narasi tersebut tentunya memperoleh resonansi yang cukup kuat karena berkaitan dengan risiko yang sulit dikonfirmasi langsung oleh publik (Welle, 2023)

Indikasi penerimaan terhadap narasi ancaman itu dapat dilihat dari survei *Genron NPO* dan *China International Communications Group* yang dilakukan setelah pelepasan air Fukushima dimulai pada 2023. Survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 47,6% responden Tiongkok menyatakan kekhawatiran terhadap pembuangan air Fukushima ke laut. Data menunjukkan bahwa konstruksi ancaman yang dibangun sebuah negara memperoleh resonansi yang sangat tinggi di ruang politik (NPO, 2023). Hal yang penting dari data ini bukan hanya tingkat kekhawatirannya, tetapi juga adanya kesesuaian antara narasi ancaman pemerintah dan persepsi risiko di masyarakat. Penjelasan tersebut tentunya diperkuat oleh studi komunikasi publik di ruang digital Tiongkok yang menunjukkan tingginya intensitas diskusi dan persepsi risiko terkait isu limbah Fukushima. Hal ini menandakan bahwa isu limbah Fukushima tidak lagi dibahas semata sebagai persoalan teknis tentang keselamatan atau pengelolaan limbah nuklir saja, tetapi semakin sering dipahami melalui kerangka ancaman terhadap kesehatan manusia, keamanan pangan, dan lingkungan laut (Putri, 2023). Dengan demikian, *audience acceptance* dalam kasus limbah Fukushima dapat dilihat sebagai keberhasilan negara membangun keselarasan antara definisi ancaman yang diproduksi melalui institusi negara dan cara publik memaknai risiko tersebut.

Penerimaan ini kemudian menjadi sumber legitimasi bagi kebijakan Tiongkok terhadap Jepang. Dalam perspektif sekuritisasi, legitimasi tidak muncul hanya karena

sebuah negara memiliki otoritas formal untuk bertindak, akan tetapi karena tindakannya lah yang memperoleh pembenaran sosial yang cukup. Ketika sebuah ancaman diterima sebagai sesuatu yang nyata dan serius, ruang politik bagi negara untuk mengambil tindakan menjadi lebih luas (Wang et al., 2022). Oleh karena itu, *audience acceptance* berfungsi sebagai jembatan antara konstruksi ancaman dan penerapan kebijakan yang lebih keras terhadap Jepang.

Dalam perkembangannya, legitimasi tersebut membuka ruang bagi penerapan berbagai *extraordinary measures*. Namun, kebijakan seperti pembatasan impor produk perikanan Jepang tidak otomatis bisa disebut *extraordinary measures* hanya karena muncul setelah konstruksi ancaman berlangsung (Junji, 2023). Dalam perkembangannya, legitimasi tersebut membuka ruang bagi penerapan berbagai *extraordinary measures*. Namun, kebijakan seperti pembatasan impor produk perikanan dari Jepang tidak secara otomatis bisa disebut *extraordinary measures* hanya karena muncul setelah konstruksi ancaman berlangsung (Junji, 2023). Embargo atau pembatasan perdagangan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen yang lazim digunakan dan dapat dijelaskan melalui berbagai logika seperti perlindungan kesehatan publik, keamanan pangan, kepentingan ekonomi domestik, maupun tekanan diplomatik (Stefani, 2023).

Akan tetapi, dalam kasus limbah Fukushima, kebijakan tersebut memperoleh makna yang berbeda karena dilegitimasi melalui kerangka perlindungan terhadap ancaman. Dalam konteks ini, kebijakan

Tiongkok tidak lagi dibaca semata sebagai respons administratif atau langkah perdagangan biasa, tetapi sebagai tindakan pencegahan yang didorong oleh logika keamanan (Niên, 2026). Artinya, pembatasan impor tidak hanya diarahkan untuk mengatur arus barang, melainkan untuk melindungi *referent object* yang telah dikonstruksi sebagai pihak yang terancam, yaitu kesehatan manusia, keamanan pangan, dan lingkungan laut.

Di sini terlihat bahwa negara tidak sekadar mengatur perdagangan, tetapi menggunakan kewenangan regulatifnya sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan. Dengan demikian kebijakan tersebut mencerminkan *security logic*, yakni ketika suatu risiko dipahami sebagai ancaman, maka negara merasa perlu mengambil langkah yang lebih tegas, lebih cepat, dan lebih melampaui kebiasaan normal dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, logika yang bekerja di balik kebijakan tersebut adalah logika keamanan yang menempatkan tindakan pembatasan sebagai respons atau langkah luar biasa yang diperlukan untuk mencegah risiko yang dianggap lebih besar.

SIMPULAN

Dalam kasus limbah nuklir Fukushima ini membuktikan bahwa keamanan dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan pada ada atau tidaknya bahaya secara nyata, tetapi juga pada bagaimana bahaya itu dimaknai, diperdebatkan, dan dilegitimasi dalam sebuah ruang politik. Dalam penelitian ini kita dapat melihat bahwa proses sekuritisasi bekerja melalui pembentukan makna, penguatan institusi, serta penerimaan

publik yang tentunya memungkinkan sebuah isu teknis berubah menjadi dasar bagi tindakan yang lebih tegas. Oleh karena itulah, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca isu lingkungan lintas batas bukan hanya sebagai persoalan teknis atau diplomatik saja, tetapi sebagai proses politik yang melibatkan produksi ancaman dan legitimasi kebijakan. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada perbandingan dengan kasus serupa di negara lain agar terlihat bagaimana pola sekuritisasi lingkungan bekerja dalam konteks yang berbeda, termasuk bagaimana media, opini publik, dan kebijakan negara saling mempengaruhi dalam membentuk respons terhadap risiko transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, L. D., Arman, A., & Richard, M. W. (2024). Upaya hukum terhadap praktik pembuangan limbah nuklir. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(3), 162–175. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/23322>
- Anisa, A. P., & Atman, W. (2025). Estetika sekuritisasi: Peran narasi visual dalam membangun persepsi ancaman global. *Sosial Simbiosis*, 2(3), 155–171. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2050>
- Athallah, I. D. (2022). Sekuritisasi isu lingkungan dalam hambatan perdagangan sawit di European Green Deal. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 176–204. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.300>

- Azizah, M., Fatinah, D., Sari, I. F., Andriani, N. P., Veronica, O. A., & Sharapova, T. (2024). Pertanggungjawaban Jepang terhadap pembuangan air limbah nuklir: Pelanggaran hukum lingkungan internasional mengancam lingkungan global. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(2), 153–165. <https://doi.org/10.24198/litra.v3i2.1740>
- Baele, S., & Thomson, C. (2025). Securitization theory. In A. Collins (Ed.), *Contemporary security studies* (7th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198895442.003.0007>
- Bhramanta, A. B. (2023). Sekuritisasi pemerintahan Kiribati dalam isu kenaikan air laut tahun 2012–2016 [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46238>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Chen, S. (2023). Implementing precautionary principle in the marine environment under the background of Japan's Fukushima nuclear water discharge. *SHS Web of Conferences*, 180, Article 01005. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202318001005>
- Cheng, J. (2024). The problem science cannot solve: Fukushima's wastewater release and the path forward. University of Chicago. <https://doi.org/10.6082/UCHICA.GO.11873>
- Christiastuti, N. (2023, August 23). Jepang mulai persiapan akhir untuk buang limbah PLTN Fukushima ke laut. DetikNews. <https://news.detik.com/internasional/d-6891598/jepang-mulai-persiapan-akhir-untuk-buang-limbah-pltn-fukushima-ke-laut/amp>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davidson, H. (2025, November 19). China suspends seafood imports from Japan as Taiwan row escalates. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2025/nov/19/china-suspends-seafood-imports-from-japan-as-taiwan-row-escalates>
- Debin, Z. (2023, October 8). Japan claims water safe, doesn't care about destructive, long-term effects. Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202310/1299429.shtml>
- Welle, D. (2023, August 24). Cina kecam Jepang usai buang limbah nuklir di Fukushima. DW. <https://www.dw.com/id/cina-kecam-jepang-usai-buang-limbah-nuklir-di-fukushima/a-66618692>

- Ebenhaezer, Y., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Kebijakan pemerintah Jepang dalam pengelolaan limbah nuklir di tahun 2023: Dampak terhadap persepsi publik internasional. *VISA Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 1392–1413. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.2904>
- Fariz, A., Pratama, R. S., Silaban, F., Hasibuan, M., Siregar, R., & Manurung, M. F. (2023). Krisis lingkungan dan implikasinya terhadap keamanan manusia. *Student Research Journal*, 1(6), 210–219. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i6.829>
- Flohr, M. (2025, March 31). Key concept: Securitization (Copenhagen School). Critical Legal Thinking. Retrieved June 18, 2026, from <https://criticallegalthinking.com/2025/03/31/key-concept-securitization-copenhagen-school/>
- Global Times. (2026, June 14). Release of Fukushima nuclear-contaminated wastewater halted again following abnormal alarm in transfer process. The Global Times. Retrieved June 17, 2026, from <https://www.globaltimes.cn/page/202606/1363468.shtml>
- Hayashida, N., & Horiguchi, I. (2024). The summary of risk response on radioactive substances contained in food items in the aftermath of the Fukushima nuclear accident. *Journal of Radiation Research*, 65(Supplement_1), i97–i105. <https://doi.org/10.1093/jrr/rrae020>
- He, Y., & Zhao, M. (2024). Research on international marine pollution control issues: Based on the Fukushima pollution incident in Japan. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 65(1), 9–18. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/65/2024mu0017>
- Hu, J. (2025). Framing Fukushima discharge water: A cross-cultural analysis of media narratives in China and Japan. *Media and Communication Research*, 6(4), 129–135. <https://doi.org/10.23977/mediacr.2025.060415>
- IAEA. (2025, December 20). Japan continues to meet international safety standards in discharge of ALPS-Treated water, IAEA task force confirms. International Atomic Energy Agency. Retrieved June 18, 2026, from <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/japan-continues-to-meet-international-safety-standards-in-discharge-of-alps-treated-water-iaea-task-force-confirms>

- Junji, N. (2023, October 31). Cara Menangani Pemaksaan Ekonomi: Larangan Impor Makanan Laut Jepang Oleh China Melanggar Hukum Internasional. Research Institute Economy, Trade and Industry. Retrieved June 17, 2026, from <https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/nakagawa-junji/03.html>
- Karyotis, G., Paterson, I., & Judge, A. (2025). Understanding securitization success: A new analytical framework. *International Studies Review*, 27(1). <https://doi.org/10.1093/isr/viaf006>
- Koppenborg, F. (2023). Japan's nuclear disaster and regulatory politics. In *Japan's nuclear disaster and the politics of safety governance*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501770043.003.0001>
- Lederer, M. (2025). It's political institutionalization, not tipping points, that explain transformations. *Dialogues on Climate Change*, 2(2–3), 145–148. <https://doi.org/10.1177/29768659251408254>
- Li, M., & Wang, X. (2023). Legal responses to Japan's Fukushima nuclear wastewater discharge into the sea: From the perspective of China's right-safeguarding strategies. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15701>
- Liang, X., Yang, S., Lou, Z., & Ali, A. (2024). The impact of Japan's discharge of nuclear-contaminated water on aquaculture production, trade, and food security in China and Japan. *Sustainability*, 16(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su16031285>
- Mabon, L., & Kawabe, M. (2022). Bring voices from the coast into the Fukushima treated water debate. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(45). <https://doi.org/10.1073/pnas.2205431119>
- McCurry, J., & Davidson, H. (2023, August 24). China bans Japanese seafood after Fukushima wastewater release. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2023/aug/24/japan-begins-releasing-fukushima-wastewater-into-pacific-ocean>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China. (2023, August 24). Foreign Ministry spokesperson's statement on the Japanese government's start of releasing Fukushima Nuclear-Contaminated water into the ocean. Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China. Retrieved June 17, 2026, from https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/fyrbt/fyrbt/202405/t20240530_11349809.html

- Muliawan, R. I., Seba, R. O. C., & de Fretes, C. H. J. (2024). Respons negara China terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima. *Media Bina Ilmiah*, 18(9), 2413–2424. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/775>
- NPO, Genron, & China International Communications Group. (2023, October 10). Japan–China opinion poll 2023 mentions the possibility of nuclear war for the first time. https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/docs/Japan-China%20Joint%20Public%20Opinion%20Survey%202023.pdf
- Ng, K. (2023, August 22). *Jepang akan melepas air olahan bekas radiasi nuklir Fukushima ke laut dalam 48 jam*. BBC News Indonesia. Retrieved June 18, 2026, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1r5qdxqy3eo>
- Niên, B. T. (2026, June 4). China memperketat standar impor: Tekanan atau peluang? Vietnam.vn. <https://www.vietnam.vn/id/trung-quoc-siet-tieu-chuan-nhap-khau-ap-luc-hay-co-hoi>
- Nufus, S. F. A., Rizki, K., & Rizki, K. Z. (2023). Respon Tiongkok terhadap ancaman keamanan maritim sebagai dampak dari pembuangan limbah nuklir Jepang ke Samudra Pasifik. <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/44155>
- Polleri, M. (2025). Fukushima and the politics of nuclear disaster recovery. *Current History*, 124(863), 216–221. <https://doi.org/10.1525/curh.2025.124.863.216>
- Putri, A. M. H. (2023, August 28). Dampak limbah nuklir Fukushima: Ikan dari Jepang aman? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230828065547-128-466542/dampak-limbah-nuklir-fukushima-ikan-dari-jepang-aman>
- Qi, X., & Gao, L. (2025). Analysis of the development trend of Chinese seafood imports from Southeast Asia after the Fukushima-Daiichi radioactive treated water discharge from Japan. *PLOS ONE*, 21(1). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571293/>
- Qi, Y., You, K., & Guo, S. (2022). The battle for public opinion of "Japan's nuclear wastewater sea discharge." *Open Journal of Political Science*, 12(3), 363–372. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.123021>
- Rasmussen, J. (2023). Combining governmentality and discourse analysis. In A. Ädel & J.-O. Östman (Eds.), *Risk discourse and responsibility* (pp. 40–64). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/pbns.336.02ras>
- Samsidar. (2025). Politics and psychology of fear: Threat narratives in state security policy. *Journal of Politica Governo*, 2(2), 41–47. <https://doi.org/10.62872/jz3yg883>

- Sasmi, D. T. (2025). Modul politik lingkungan global. Repository Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/id/ep rint/25174>
- Shakira, A. A. (2025). Sekuritisasi isu perubahan iklim pemerintahan Tuvalu melalui Tuvalu Coastal Adaptation Project tahun 2012–2024 [Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/37451/>
- Sharma, L. P. (2024). Role of international relations to solve environmental issues: An emerging discourse. *Journal of Environment Sciences*, 10, 163–176. <https://doi.org/10.3126/jes.v10i1.67300>
- Somawinata, C. J. (2025). Pengawasan IAEA terhadap pengelolaan limbah nuklir sebagai upaya pencegahan pencemaran laut lintas batas (Studi kasus limbah nuklir Fukushima) [Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <https://repository.uaajy.ac.id/id/ep rint/35201/>
- Srivastava, J. (2023). Dynamics of environmental security in the Indo-Pacific. In B. Kratiuk, J. van den Bosch, A. Jaskólska, & Y. Sato (Eds.), *Handbook of Indo-Pacific studies* (pp. 222–247). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003336143-15>
- Stefani. (2023, October 19). Embargo Adalah: Pahami Arti, Jenis, Dampak Serta Tujuannya. Tradecorp. Retrieved June 17, 2026, from <https://kontainerindonesia.co.id/embargo-adalah/>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sun, C., Ren, Q., Liu, X., & Ge, Y. (2026). Framing analysis of Japan and China's response to Fukushima water discharge: Technical rationality vs. local experience. *Earth System Governance*, 27, Article 100313. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2026.100313>
- Sun, C., Ren, Q., & Ge, Y. (2025). Local response to global risk: A case study of risk perception and communication on Chinese social media regarding Fukushima's treated radioactive water discharge. *Scientific Reports*, 15, Article 18136. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-02845-8>
- Verma, A., & Snyder, K. (2025). Why and how the debate about nuclear energy needs to be reframed for the future. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 81, 437–444. <https://doi.org/10.1080/00963402.2025.2588030>
- Wang, X., Huang, Y.-H. C., & Zhang, M. M. (2022). Framing matters but varies: A semantic network analysis of media representations of post-Fukushima food imports across three Chinese societies. *Global Health Promotion*, 29(3), 97–108. <https://doi.org/10.1177/17579759211073180>

- Wang, Y. (2024). The critical cognitive analysis of "hyper-securitization" strategy: A case study of China's official discourse on the Japan nuclear contaminated water discharge incident. *Discourse & Society*, 36(5). <https://doi.org/10.1177/09579265241289604>
- Xinhua. (2026, June 11). Abnormal alarm halts Fukushima nuclear-contaminated wastewater release. *Chinadailyhk*. Retrieved June 18, 2026, from <https://www.chinadailyasia.com/hk/article/634807>
- Xinhua. (2026, June 17). Release of Fukushima nuclear-contaminated wastewater halted again following abnormal alarm in transfer process. *Xinhua News*. Retrieved June 17, 2026, from <https://english.news.cn/asiapacific/20260613/671ddb4efddf4467a6c27c8352a75e38/c.html>
- Yuan, C., & Lee, B. T. F. (2023). From rivals to partners: The evolution of environmental cooperation among China, Japan, and Korea. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(1), 60–89. <https://doi.org/10.7454/global.v25i1.1267>
- Zhang, X., & Xu, Q. (2024). Reflections on governing Japan's discharge of Fukushima nuclear-contaminated water: From the perspective of building a maritime community with a shared future. *Marine Development*, 2, Article 20. <https://doi.org/10.1007/s44312-024-00034-1>